

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, beragama Islam secara nominal. Dengan demikian, Islam menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan jika ingin mempelajari dan memahami politik di Indonesia.¹ Kemudian jika bicara Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari Muhammadiyah dan NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, yang mewakili kutub yang berbeda. Muhammadiyah mewakili kutub modernis, sedangkan NU mewakili kutub tradisional. Sekalipun akhir-akhir ini (sejak tahun 1990-an) istilah dikotomis antara “tradisional-modern” dirasakan tidak relevan lagi untuk dialamatkan kepada gerakan-gerakan keagamaan (Islam) di Indonesia. Namun kalau orang bicara tentang gerakan Islam di sekitar permulaan abad ke-20 tentu hal itu masih sangat relevan.² Namun menurut Kuntowijoyo, terkikisnya dikotomi antara modernis dengan tradisional sejak pemakaian buku standar nasional pada semua tingkatan pendidikan agama.³ Muhammadiyah berbasis urban atau kota, pedagang, dan pegawai sedangkan NU berlatar belakang petani, pedesaan dan pesantren. Muhammadiyah menghasilkan intelektual, sedangkan Nu

¹ Anders Ullin, *Oposisi Bergerak arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, terjemahan Rofik Suhud, Mizan, Bandung, 1998, hlm, 67.

²² Muhammad Damami, *Akar Gerakan Muhammadiyah*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2000, hal 1

³³ Kuntowijoyo, *Konvergensi dan Politik Baru Islam*, Pengantar Dalam Abdul Munir Mulkan, ...

menghasilkan ulama'.⁴ Namun kajian ini hanya akan menyoroti lebih dalam tentang Muhammadiyah sebagai gerakan modernis atau gerakan reformis di Indonesia.

Didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912 atau pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H di Kota Yogyakarta, kota yang disebut sebagai jantung ibukota kebudayaan Jawa.⁵ Secara internal ada dua hal yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah, sebagaimana yang diungkap kembali oleh Amien Rais,⁶ sebagai berikut:

“...Pertama, melepaskan umat Islam dari kungkungan tahayul, bid'ah, khurofat yang membelenggu Umat Islam dari penuhanan tauhid yang benar, yang kedua, memajukan pendidikan Islam dengan memberikan angkatan mudanya ilmu-ilmu barat dalam rangka merebut kembali kebahagiaan keduniaan yang harus dikejar oleh umat Islam.”

Sedangkan secara eksternal, KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah sebagai reaksi atas aktifitas misionaris Kristen (Misi Katholik dan Zending Protestan), teruta di sekitar Jawa Tengah dan Jogjakarta.⁷ alasan lainnya karena pengaruh nasionalisme pada abad permulaan abad ke- 20 yang banyak bertumpu pada kata kunci “ nasionalisme” yang berarti paham yang mementingkan perbaikan dan

⁴ Kuntowijoyo, *Tiga Strctegi Pergerakan Islam: Struktural, Kultural, dan Mobilitas Sosial*, dalam Nurhadi, Musafir (ed), *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah (Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M/1417-1418 H*, Lembaga Pustaka dan Dokumentasi PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 1996, hlm,39.

⁵ James L Peacock, *Gerakan Memurnikan ajaran Islam di Indonesia*, Jakarta : Cipta Krestif, 1986, hal, 31.

⁶ M. Amien Rais, *Visi dan Misi Muhammadiyah*, Yogyakarta : Pustaka Suara Muhammadiyah, 1997, hal 15.

⁷ Alwi Shihab, *Membendung Arus Deras Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia* Bandung : Mizan, 1998, hal 24

kesejahteraan nation atau bangsa.⁸ Sejak awal didirikan, Muhammadiyah dimaksudkan sebagai organisasi dakwah dan pendidikan (organisasi sosial-keagamaan), bukan sebagai organisasi politik. Oleh karena itu, politik dasar Muhammadiyah adalah sikap yang moderat, kooperatif, dan tidak menjadi oposan. Dalam menghadapi gelombang perubahan politik Muhammadiyah selalu hati-hati dan bersikap lentur. Fenomena ini menimbulkan kesan yang positif bagi pemerintah Belanda yang menganggap Muhammadiyah tidak membahayakan eksistensi kolonial mereka.⁹ Hal ini karena Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Dimana pendidikan sendiri menjadi salah satu isi dari politik etis yang dilakukan Belanda yang diusulkan oleh Van Deventer. Dimana masalah pendidikan hampir tidak tergarap dan memang sengaja tidak di garap sebelum politik etis di cetuskan.¹⁰ Padahal secara jangka panjang pendidikan sebenarnya mempunyai ancaman yang serius bagi kelangsungan kolonialisme belanda sendiri, mengingat bahwa pendidikan merupakan politik jangka panjang.

Komitmen Muhammadiyah untuk lebih mengutamakan bidang dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di wujudkan dengan tegas bahwa Muhammadiyah terlepas dari politik . Hal ini tidak berarti bahwa Muhammadiyah anti politik, karena bagaimanapun Muhammadiyah pasti

⁸ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994 , hal 4.

⁹ A. Syafi' Ma'rif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta : LP3ES, 1987, hal 66

terlibat atau turut bermain dalam politik.¹¹ Namun keterlibatan Muhammadiyah dalam politik semata-mata hanya untuk kepentingan dakwah itu sendiri bukan yang lainnya. m belum pernah dan barangkali tidak akan pernah berubah menjadi organisasi atau partai politik.¹²

Sebagai contoh, pada masa kolonial Belanda, Muhammadiyah menentang adanya ordonansi guru tahun 1925 yang dimotori oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Haji Rosul, Sutan Mansur, dan HAMKA.¹³ Juga pada masa pendudukan Jepang dimana KH. Mas Mansur masuk kedalam empat serangkai bersama Sukarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa bahwa larangan melakukan *saikere*¹⁴ di sekolah-sekolah atau pertemuan-pertemuan Muhammadiyah. Pada masa proklamasi kemerdekaan pun Muhammadiyah terlibat dalam penyusunan konstituante dengan menyetujui penghapusan semboyan kata dalam pembukaan UUD 1945.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik dilanjutkan saat Muhammadiyah masuk menjadi anggota Masyumi, bahkan Muhammadiyah menjadi mayoritas dalam Masyumi dengan persentase rata-rata 55 % dalam kepengurusan.¹⁵ Dan menjadikan Masyumi sebagai “tangan politik “ atau sebagai “penyalur politik ”.¹⁶ Apalagi Muhammadiyah waktu itu tidak ada wadah lain selain Masyumi, bahkan dalam sidang konstituante,

¹¹ Syafi'i Ma'arif, dalam *Ulumul Qur'an*, Op, Cit hal 11

¹² Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal 2

¹³ Ibid, hal 27

¹⁴ Saikere adalah membungkuk kearah matahari untuk menghormati Teno Heika, gelar kaisan Jepang. Menurut Muhammadiyah hal ini termasuk dalam kategori syirik yang sangat di tentang dalam Muhammadiyah. Lihat dalam Syfi'i Ma'arif, *Muhammadiyah dan High Politic*, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 2 Vol. IV tahun 1995 hal 10..

¹⁵ Saifullah, *Corban Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Jakarta : Duta Kita Utama Grafiti

Muhammadiyah mengusulkan konsepsi negara Islam hasil muktamar di Purwokerto tahun 1953.¹⁷ Di akhir orde lama, Muhammadiyah bahkan mengeluarkan fatwa bahwa “ membubarkan PKI adalah ibadah”¹⁸ dan dengan di bubarkannya Masyumi tahun 1960, Muhammadiyah dipaksa mundur dari keterlibatan dalam dunia politik praktis. Kendatipun ada usaha terlibat lagi dalam politik lewat pendirian Parmusi pada awal ord baru dan ternyata gagal. Walaupun Muhammadiyah mendapatkan pengakuan sebagai organisasi yang mempunyai fungsi politik yang nyata.

Berkaca dari pengalaman yang pahit kektika terjun dalam politik praktis, maka Muhammadiyah mengambil sikap untuk melepaskan diri dari parpol manapun dan sejauh mungkin untuk bersifat netral tanpa harus kehilangan jati diri sebagai gerakan reformis, hal ini sebagai keputusan dari Muktamar Muhammadiyah di Ujung Pandang tahun 1971, dimana Muhammadiyah tidak akan berafiliasi dengan parpol manapun. Tetapi dengan catatann bahwa para anggota Muhammadiyah bebas untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui parpol yang tidak merugikan Islam. Keputusan ini sesuai dengan kondisi waktu itu, karena negara (Orde Baru) telah melakukan upaya-upaya sistematis dan beransur-ansur mengambil alih peranan sosial politik yang sebelumnya berada di pihak Islam (era Masyumi). Dimana waktu itu muncul wacana “ Islam Yes”, “Partai Islam No” ? ” yang dilontarkan oleh Nurcholish Majid, Atau dengan kata lain sebagai “Selamat Tinggal Nashir”

¹⁶ Suwarno, Op. Cit, hal 3

¹⁷ loc Cit, hal 37

¹⁸ M. F. Kemal, *Partai dan Ahmad Dahlan*, 14, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*

“Selamat Datang Nurcholish Majid” atau “Selamat Tinggal Orde Lama
“Selamat Datang Orde Baru”.

Khiōthoh Muhammadiyah 1971 ini menurut Din Syamsudin disebut sebagai “Politik Alokatif” . Istilah ini mengandung arti bahwa aktifitas politik Muhammadiyah diupayakan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu di dalam kerangka idiologi negara, yang dimaksud dengan nilai-nilai teertentu adalah prinsip-prinsip Islam yang ditanamkan ke dalam proses pembangunan berdasar Pancasila. Penerapan politik alokatif ini nampak terlihat masa kepemimpinan KH. AR Fachrudin yang terkesan inklusif dan “njawani” yang sama dengan gaya kepemimpinan pengusa Orde Baru saat itu, Soeharto yang juga njawani.

Perilaku politik Muhammadiyah mengalami perubahan setelah Amien Rais menjadi ketua PP Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh tahun 1995. Dimana dalam salah satu program kerjanya memasukkan High Politik dalam pendahuluan program kerja Muhammadiyah periode 1995-2000. Dengan dasar high politics inilah Muhammadiyah kembali kritis kepada pemerintah yang berkuasa setelah sekian lama bersifat akomodatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sikap kritis Muhammadiyah ini diantaranya dengan memunculkan isu suksesi nasional, dan mengkritisi kebijakan-pemerintah yang banyak merugikan Bangsa Indonesia sendiri.

Pada masa inilah terjadi pergeseran dari gerakan sosial ke politik ,
meskipun Muhammadiyah tetap dalam basis strategi kultural dan untuk pertama

kalinya dalam sejarah Muhammadiyah dipimpin oleh “orang sekolahan” (cendekiawan; bukan ulama tradisional). Pada masa inilah terjadi multi kritis yang berakibat dengan tumbanganya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun.

1. Transisi Menuju Demokrasi

Dengan mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenannya yang telah diduduki selama 32 tahun pada tanggal 21 Mei 1998 berakhirilah rezim otoriter orde baru diganti oleh rezim baru yang menamakan diri reformasi dengan Habibie sebagai presiden pertama era ini. Naiknya Habibie telah membuka kran demokrasi kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga menimbulkan euforia politik atau mabuk kebebasan. Perpindahan rezim ini tidak bisa dilepaskan oleh sosok Amien Rais selaku ketua Muhammadiyah saat itu, dimana ia menjadi lokomotif reformasi.

Jalan menuju transisi demokrasi di setiap negara tidak berjalan mulus. Pemerintah baru manapun yang tengah memasuki transisi menuju demokrasi umumnya menghadapi sejumlah masalah serius. Masalah yang paling mendasar yang sedang dihadapi pemerintah transisi adalah keharusan melembagakan demokrasi sebagai alternatif tunggal bagi otoriterianisme yang ternyata telah gagal sebagai landasan politik bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam demokrasi membutuhkan persetujuan. Persetujuan membutuhkan legitimasi. Legitimasi membutuhkan kinerja yang efektif. Tetapi efektifitas bisa dikorbankan untuk persetujuan.¹⁹

¹⁹

Naiknya Habibie sebagai presiden ke-4 negeri ini menggantikan pendahulunya yang juga gurunya menimbulkan pro dan kontra mengenai sah tidaknya kenaikan tersebut. Selama tida dekade Soeharto berkuasa yang didasarkan pada legitimasi yang dipaksakan, sehingga apa yang dialami oleh Habibie kini mendapatkan akibat dari kebijakn yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Karena proses pemindahan kekuasaan dari soeharto ke Habibie yang dilakuka tidak di gedung MPR menimbulkan adanya dua kelompok besar yang mendukung dan yang menolak legitimasi pemerintahan dari Habibie.

Kelompok yang menganggap proses peralihan kekuasaan itu tidak sah dan inskonstitusional karena prosedur dan dasar hukum yang dipakai cacat dan lemah ini terdiri dari Barisan Nasional dengan tokohnya seperti subroto, Kemal Idris, Ali Sadikin, dan Dimiyati Hartono yang pada tanggal 17 Agustus 1998 mendeklarasikan "Manivesto Demokrasi " dengan tegas menolak pemerintahan Habibie yang dinilai tidak sah dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.²⁰

Sedang kelompok yang mendukung suksesi ini sah menganggap proses suksesi dari Soeharto ke Habibie diatas sebagai fakta kontitusional, sehingga tidak perlu diragukann lagi legalitasnya berasal dari kelompok Islam termasuk yang menerima naiknya Habibie ini. Mereka bersal dari KISDL, HMI, PII, dan Muhammadiyah serta Pimpina ABRI. Bahkan dalam pertemuan dengan ulama-ulama Islam seikat Ikatan PB Muhammadiyah saat itu Sumfi:

Ma'arif menggagas empat politik permasalahan umat yang menyangkut kualitas umat yang tidak sebanding dengan kuantitasnya, ketertinggalan di bidang ekonomi, perpecahan kalangan umat sendiri dan lemahnya posisi tawar menawar dalam politik sehingga selalu menjadi subordinat dari kekuatan lainnya.²¹

Masalah yang sedemikian besar hasil warisan rezim lama merupakan masalah yang harus segera ditangani secepat mungkin, karena kalau diabaikan akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan yang semakin besar antara yang kaya dengan yang miskin serta ancaman disintegrasi bangsa, untuk itulah maka tugas Habibie adalah untuk sesegera mungkin melakukan reformasi disegala bidang kehidupan.

Agenda reformasi yang digulirkan diantaranya adalah penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Penegakan HAM, amandemen UUD 1945, percepatan Pemilu dan sebagainya. Pada masa pemerintahan Habibie yang sebentar ini telah lahir banyak keputusan penting yang akan berpengaruh terhadap jalannya sejarah Indonesia di kemudian hari. Diantaranya adalah pembebasan tahanan politik yang semasa orde baru masuk penjara tanpa proses hukum yang jelas, penyelenggaraan otonomi daerah dan sebagainya.

Dan paling penting adalah lahirnya UU No 3 tahun 1999 tentang

1999 ini adalah pemilu yang paling demokratis setelah pemilu 1955 yang lalu. Dalam pemilu yang diikuti oleh 48 partai politik peserta pemilu²², salah satunya peserta pemilu adalah parpol yang dipimpin oleh Amien Rais, sebuah parpol yang lahir untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama, suubangsa, dan kedaerahan. Maka lahirlah Partai Amanat Nasional (PAN) pada Agustus 1998.²³

Ada dua hal yang menarik dalam periode ini dimana Amien Rais selaku ketua PP Muhammadiyah mengundurkan diri selaku ketua umum untuk lebih berkonsentrasi dalam memimpin PAN yang baru didirikannya, dan kedua hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah yang merekomendasikan agar Muhammadiyah menyalurkan aspirasi politiknya secara nyata untuk mewujudkan pintu-pintu politik bagi umat Islam.²⁴

Dalam pemilu 1999, PDI Politik tampil sebagai pemenang pemilu dengan meraih angka 33,76 % yang di kemudian diikuti oleh Partai Golkar dengan 22,46 % lalu diikuti PKB dengan 12,62 % dan kemudian PPP dengan 10,72 % dan PAN sendiri yang dipimpin mantan ketua PP Muhammadiyah Amien Rais hanya memperoleh 7,12 %

Kekalahan PAN dalam pemilu 1999 ini banyak kalangan yang kecewa karena disinyalir bahwa ternyata tidak semua anggota Muhammadiyah menyalurkan aspirasinya ke PAN yang dipimpin oleh mantan ketua Muhammadiyah, walaupun memang secara organisatoris tidak ada hubungan

²² Tekad, No. 19 Th I, 8-14 Maret 1999.

antara Muhammadiyah dengan PAN, ini merupakan suatu ironi ketika anggota Muhammadiyah sendiri mempunyai sekitar 28 juta umat ini, sedangkan PAN hanya memperoleh 7 % atau sekitar 53 suara saja. Asumsi sejak awal bahwa "komunitas matahari" yang berjumlah 28 juta akan menetapkan pilihannya pada partai ini, walaupun ternyata rontok di tengah jalan.

Sedangkan kelahiran PAN sendiri merupakan hasil Ijtihad dari Sidang Tanwir di Semarang tahun 1998. Ada sebagian pendapat yang menilai kekalahan PAN ini karena PAN sebagai partai yang lahir dari Ijtihad politik orang-orang Muhammadiyah ternyata tidak mendapatkan dukungan dari sosio kultural warga Muhammadiyah sendiri..diantaranya karena asas yang tidak Islam. Dari sinilah maka keinginan Amien Rais untuk menduduki sebagaipresiden RI ke-4 dirasa sangat mustahil dan tidak etis dengan perolehan sebesar itu.

2. Arti Penting Reformasi Bagi Muhammadiyah

Melihat perilaku politik Muhammadiyah selama era reformasi dari tahun 1998 sampai tahun 2004 ini, setidaknya ada beberapa hal yang menarik untuk dapat dikaji lebih dalam, sehingga dapat diketahui benang merah perilaku politik Muhammadiyah itu sendiri. Adapun hal-hal menarik pada era reformasi yang ada pada perilaku politik Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

Muhammadiyah, yang menarik penolakan ini bukan karena Mega adalah perempuan namun karena sebab lainnya.

Keenam, Dalam Sidang Tanwir di Makasar yang dilanjutkan dengan Sidang Pleno Lanjutan di Yogyakarta yang diikuti oleh seluruh organisasi otonom, Muhammadiyah menghasilkan rekomendasi untuk mendukung sepenuhnya langkah Amien Rais selaku mantan ketua PP Muhammadiyah, tokoh reformasi dan kaser terbaik bangsa dan untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan menyelamatkan bangsa dalam pemilihan presiden pada pemilu 2004.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana perilaku politik Muhammadiyah dalam percaturan politik di Indonesia sejak runtuhnya otoriterlanisme Orde Baru sampai pemilu 2004.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberi jawaban terhadap rumusan masalah diatas, yaitu bagaimanakararakteristik sikap dan perilaku politik Muhammadiyah dalam percaturan di Indonesia sejak runtuhnya otoriterlanisme Orde Baru sampai Pemilu 2004

Komponen perilaku politik dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan sikap yang dihadapi. Kaitan ini didasari bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.²⁸

Sedangkan perilaku politik juga dapat diartikan sebagai fungsi dari kondisi sosia, ekonomi, dan fungsi kepentingan, maka perilaku politik sebagainya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi, dan kepentingan suatu masyarakat, atau golongan dalam masyarakat tertentu. Perilaku politik dapat juga diartikan sebagai perbuatan, perlakuan, dan tindakan dan juga aksi yang dijalankan oleh individu, atau kelompok, atau masyarakat sebagai respon sebagai stimulan dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk.²⁹ Lebih lengkapnya seperti pendapat dari Jack P. Plome dan Helene bahwa perilaku politik merupakan pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap, dan keyakinan) dan juga kegiatan-kegiatan yang nampak seperti pengumuman suara, gerak, kaukus, dan kampanye.

Ramlan Surbakti mendefinisikan perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik , interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, antara kelompok dan individu dlam masyarakat dalam rangka prses pembuatan, pelaksanaa, dan penegakan keputusan politik. Perilaku politik dapat juga diartikan sebagai perbuatan, [perlakuan, atau tindakan dan juga aksi yang

²⁸ *Journal of Political Science*, Vol. 1, No. 1, 1965, hal. 107

dijalankan oleh individu atau kelompok atau masyarakat sebagai respon terhadap politik . Dari uraian diatas setidaknya dapat disimpulkan bahwa perilaku politik yang digunakan dalam penelitian ii adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh individu terhadap objek politik tertentu yang terutama sekali berkenaan dengan distribusi dan pemanfaatan kekuasaan dalam berbagai bentuk. Untuk mempermudah penelaahan, perilaku politik dapat dilihat dari dua masalah mendasar, yaitu apa yang terjadi dan mengapa dapat terjadi. Penyerderhanaan ini semata-mata untuk membantu mencapai sasaran mendiskripsikan tindakan atau perbuatan politik dan penjelasannya.

Kajian perilaku politik dapat dengan menggunakan tiga unit dasar analisi, yaitu individu sebagai aktor politik , agregasi politik dan tipologi kepribiasaan politik. Agregasi politik yaitu kelompok individu yang tergabung dalam organisasi, seperti partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintah, dalam istilah lain dikenak dengan nama perilaku politik kelembagaan. Yaitu didalam lembaga-lembaga itu sendiri sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Selain perilaku politik secara umum juga dapat ditentukan oleh sistem lain yang diyakini organisasi tersebut atau nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat tetentu.

Perilaku politik dalam sudut pandang sosiologi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perilaku sosial atau tindakan sosial terutama yang berkaitan dengan kehidupan politik (Welburn, 1978 :4). Oleh karena itu,

²⁹ Abdul Munir Mulkan, *Perbuatan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987* Dalam

tindakan sosial disini memiliki arti luas, menyangkut semua kelompok sosial, perilaku sosial, dan akses kepentingan baik secara kolektif maupun individu.

Pembahasan perilaku politik diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan politik ada yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan fungsi pemerintah dan kegiatan politik yang dilakukan masyarakat dengan fungsi politik.

Perilaku politik Muhammadiyah adalah politik yang dilakukan oleh warga yang dikategorikan politik kelompok dari organisasi Muhammadiyah dalam proses politik.³⁰

Asumsi dasar yang dikembangkan sebagai bangunan konsep dan teori tentang perilaku politik Muhammadiyah ialah kecenderungan sikap moderat, akomodatif yang selama ini melekat dan menjadi corak yang khas dari gerakan Muhammadiyah, yakni perilaku politik kooperatif dan senantiasa ingin menjaga jarak dalam semangat netralitas dalam watak gerakan kultural Muhammadiyah.³¹

Orientasi politik Muhammadiyah dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu :

Pertama, sikap politik yang cenderung menarik garis batas dengan kekuasaan dan sampai batas tertentu menunjukkan sikap oposisi atau radikal terhadap kekuasaan. *Kedua*, Akomodasionis, yaitu sikap politik kompromistik atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan (pemerintah, negara

) tetapi tidak dengan mengintegrasikan diri dalam kekuasaan selain terbatas pada kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap berpegang pada prinsip gerakan Muhammadiyah. *Ketiga*, Pragmatis, yaitu sikap politik yang mengintegrasikan diri dalam kekuasaan (pemerintah, negara) dan masuk dalam struktur kekuasaan itu dengan kecenderungan meninggalkan label ideologis Muhammadiyah.

Secara terperinci ketiga pola tersebut yang menggambarkan pola perilaku politik Muhammadiyah dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Perilaku Politik Idealis

Istilah idealis digunakan merujuk pada pandangan kelompok sejak Masyumi; dibubarkan tetap berkeinginan mengembangkan tatanan politik Islam sendiri dikalangan Umat Islam. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid kelompok Islam ini memiliki idelisasi Islam yang membedakannya dari kelompok Islam yang menjadikan Islam sebagai faktor pelengkap.

b. Perilaku Politik Akomodatif

Perilaku Politik Akomodatif merupakan mayoritas dari komunitas Muhammadiyah yang menunjukkan sikap netral pada organisasi sosial politik apapun, tetapi melakukan pilihan politik sesuai dengan aspirasi masing-masing, dan melakukan hubungan yang intensif dengan pejabat pemerintah serta ingin tetap memelihara Muhammadiyah yang menganut asas kenetralan dari kecenderungan menarik Muhammadiyah kesalah satu organisasi sosial politik tertentu.

c. Perilaku Politik Pragmatis.

Perilaku Politik Pragmatis merupakan perilaku yang lebih memanfaatkan Muhammadiyah dari pada memperjuangkan Muhammadiyah dalam percaturan politik. Kendati yang bersangkutan menolak tuduhan yang demikian.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

1. Faktor Budaya Politik Muhammadiyah

Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri aktor, dapat dianalisis dalam beberapa tipe orientasi. Yaitu : pertama, orientasi kognitif, berupa pengetahuan dan kepercayaan pada sistem politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan output dari sistem tersebut. Kedua orientasi efektif berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan perannya. Ketiga orientasi evaluatif berupa keputusan-keputusan dan pendapat-pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan orientasi keyakinan nilai-nilai dan pengetahuan yang mempengaruhi perilaku politik seseorang atau sekelompok orang dalam beragam bentuk sikap, tindakan dan partisipasi politik.

2. Faktor Kekuasaan Elit Muhammadiyah

Kekuasaan elit Muhammadiyah berarti peran yang dilaksanakan

... .. Muhammadiyah sesuai dengan norma-norma untuk

mempengaruhi orang atau kelompok pihak lain, sehingga sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang dikehendaki.

Konsep operasional yang dipandang menentukan dan menjadi fokus kajian dari faktor kekuasaan elit Muhammadiyah ialah kelompok elit mana saja yang paling berpengaruh dalam struktur kepemimpinan Muhammadiyah yang pada akhirnya ikut mempengaruhi orientasi politik Muhammadiyah dan gerakan Muhammadiyah pada umumnya dalam bidang sosial kemasyarakatan dan pembaharuan agama. Elit Muhammadiyah secara posisional dapat dikategorikan dalam struktur yang menggambarkan adanya fungsi-fungsi kekuasaan berdasarkan wewenang resmi organisasi maupun fungsi-fungsi pengaruh diluar wewenang resmi.

3. Faktor Kepentingan Politik Muhammadiyah

Kepentingan sebagai tujuan yang dikejar oleh setiap aktor, merupakan faktor dalam perilaku politik individual maupun kelompok, yang selalu melekat dalam proses politik dimanapun dan kapanpun. Menurut Roy Macridis bahwa kepentingan merupakan kekuatan pendorong yang utama bagi manusia dalam setiap tindakan manusia didasarkan pada pemilikan kepentingan.

Dalam kaitannya dengan perilaku politik Muhammadiyah, kepentingan politik ditunjukkan oleh aspek-aspek berikut. Pertama, kepentingan untuk mengalokasikan nilai-nilai keagamaan (kepentingan dalaah) melalui proses politik. Kedua, kepentingan untuk memperoleh

akses ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan individual warga Muhammadiyah untuk melakukan mobilitas vertikal baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun karir.

Sehingga perilaku politik Muhammadiyah di era reformasi adalah politik yang dilakukan oleh warga yang dikategorikan politik kelompok dari organisasi Muhammadiyah dalam proses politik, di zaman atau masa sejak runtuhnya otoritarianisme orde baru sampai pemilu 2004.

2. Politik

Politik adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga dan proses-proses politik, pressure groups, hubungan-hubungan internasional, dan tata pemerintahan. Semua ini merupakan kegiatan perorangan maupun kelompok, yang menyangkut hubungan kemanusiaan dan perorangan.³²

Dalam kepustakaan Ilmu Politik ternyata juga ada bermacam-macam definisi mengenai politik, yang pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan juga melaksanakan tujuan itu.³³

Jika politik disamakan dengan kekuasaan, maka politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah Muhammadiyah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan

³² Ensiklopedi Indonesia, PT. Ictiar Baru-van Hoove, hal 78

³³ Miriam Budihardjo, Demokrasi, H. B. J. W. G. ...

kekuasaan itu mempunyai tujuan nmenyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Politik sendiri mempunyai batasan-batasan politik seperti yang dikemukakan oleh Miriam Bidihardjo yaitu :³⁴

1. Negara (State)
2. Kekuasaan (Power)
3. Pengambilan Keputusan (Decision Making)
4. Kebijakan (Policy, Beleid)
5. Pembagian (Distribution)

3. Muhammadiyah : Sebagai Organisasi Dakwah

3.1 Pengertian Organisasi

Ada beberapa macam pengertian organisasi, beberpa merupakan cuplikan pengertian organisasi menurut beberpa pakar, diantaranya ³⁵:

a. Cril Soffer

Mula-mula organisasi didefinisikan sebagai perserikatan orang-orang yang berkelompok bersama-sama sekitara pencapaian tujuan tertentu. Namun lebih lanjut didefinisikan sebagai berikut :

Organisasi adalah perserikatan orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja dalam mana pekerjaan itu dibagi menjadi rincian tugas, diberikan diantaranya pemegang peranan, dan kemudian digabung beberapa bentuk hasil.

b. Ibnu Syamsi

Organisasi dalam arti statis yaitu organisasi sebagai wadah kerjasama kelompok orang yang berkerjasama dalam mencapai tujuan. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis adalah suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Organisasi dilihat sebagai sekelompok orang.
2. Organisasi dilihat sebagai suatu proses pembagian kerja.
3. Organisasi dilihat sebagai suatu kerjasama, sistem hubungan sosial.

3.2 Organisasi Kemasyarakatan

Dalam pengertian sehari-hari konsep tentang ormas seringkali berhadapan dengan organisasi politik, ormas adalah sekelompok kepentingan, sedangkan organisasi politik adalah partai politik.

Jika dikaitkan dengan hubungannya dengan pemilu dalam parlemen memang benar bahwa ormas tidak punya akses langsung dalam pembentukan pola keterwakilan politik secara nasional, sehingga partai politik adalah sebagai lembaga yang sah sebagai saluran politik, tetapi dalam pendekatan "power politik" ormas adalah sama pentingnya seperti organisasi politik. Konsep power politik memiliki mobilisasi massa, dari legitimasi aktual terhadap opini publik. Power Politik menilai organisasi atau kelompok berdasarkan kepentingan, sekaligus kekuatan politiknya. Karena organisasi ini dibentuk berdasarkan "kepentingan besar" maka ormas dinilai sama peran politiknya, dibandingkan dengan organisasi politik dalam pencapaian

yag dibentuk sedekar untuk iseng, kalaupun ada keisengan sebagai tujuan bersama, akan punya dampak positif yang kemungkinan sama hebatnya dapi pada yang sesungguhnya.

4. Reformasi

Istilah Reformasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai “perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) di suatu masyarakat atau negara”.³⁶ Dengan kata lain bahwa reformasi berarti usaha untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dalam bidang sosial, politik, agama, dan lain sebagainya.³⁷ Dengan demikian gerakan reformasi bermakna gerakan yang menginginkan perubahan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama disuatu masyarakat atau negara. Mengenai gerakan reformasi di Indonesia sasarannya lebih pada menginginkan perubahan radikal untuk perbaikan di bidang hukum dan politik, seperti suksesi nasional, penolakan Dwi Fungsi ABRI, dan semua produk politik rezim Orde Baru yang dianggap represif, perjuangan bagi demokratisasi, pemberantasan KKN dan penegakan rule of law.

Gerakan reformasi di Indonesia merupakan titik kulminasi dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa saat itu. Rezim orde baru yang telah berkuasa selama tiga dekade telah memperlihatkan ketidakmampuannya terhadap berbagai krisis multi dimensional berupa krisis ekonomi, politik, dan supremasi aparat birokrasinya gerakan yang dimotori

oleh mahasiswa ini menuntut agar pemerintah memenuhi aspirasi rakyat berupa demokratisasi dan keterbukaan.

Keterbukaan yang dimaksud adalah dengan menunjukkan kesediaan pemerintah untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara yang berkembang di dalam masyarakat dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar aspirasi masyarakat tersebut dapat dipenuhi oleh kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Akan tetapi harapan masyarakat tersebut cenderung terhambat karena adanya upaya pemerintah untuk mempertahankan status quo yang tercermin dari sikap pemerintah yang tidak konsisten atau *plin plan*.³⁸ Sehingga pada akhirnya aspirasi tersebut di implementasikan dengan turun ke jalan dengan cara berdemonstrasi. Ada beberapa tuntutan yang merupakan aspirasi rakyat tersebut, yakni :

4.2 Reformasi Sosial Politik

Pada bidang ini rakyat mememinta kepada pemerintah untuk memperbaharui sistem politik yang ada secara menyeluruh. Reformasi secara menyeluruh diartikan sebagai perubahan segenap sistem atau kehidupan politik , baik berupa aspek atau unsur-unsur yang berarti bahwa reformasi politik menyangkut aspek kultur, struktur, proses dan produksi. Dari kehidupan politik di Indonesia yang sedang diberlakukan dewasa ini. Berarti pula bahwa ideologi, konstitusi, penguasa eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, organisasi politik , organisasi masyarakat, masyarakat

³⁷ JS Badudu dan Sutarni Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta. 1994, hal 1146

sipil, pemilu, pola interaksi kekuasaan sampai kepada berbagai kebijaksanaan publik sebagai unsur politik yang memerlukan pembaharuan.³⁹

Selain itu adanya reformasi politik diharapkan akan terjadi pembelajaran tentang demokrasi bagi masyarakat, karena seperti diketahui bahwa selama orde baru berkuasa, aspirasi masyarakat tentang demokrasi begitu dibatasi dan suaranya dibungkam. Kini di era reformasi masyarakat semakin kritis dan menghendaki untuk berpartisipasi lebih luas.

4.3 Reformasi Ekonomi

Harus diakui bahwa selama 32 tahun orde baru berkuasa, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi hampir tanpa putus sejak dimulainya pemerintahan orde baru oleh Soeharto pada tahun 1966.⁴⁰ Akan tetapi sejak reformasi bergulir maka terlihatlah bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat itu hanya bersifat semu belaka. Hal ini terjadi karena pengerosan dari dalam oleh tindakan KKN yang dilakukan oleh para penguasa bathil beserta kroni-kroninya.

Adanya kelemahan pondasi tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang paling parah saat krisis moneter menyerang kawasan regional pada tahun 1997 yang lalu. Kurs mata uang rupiah pun menjadi jatuh dan hutang luar negeri semakin membengkak. Krisis ekonomi pada akhirnya memunculkan tuntutan adanya pembaharuan pada bidang ekonomi dengan

³⁹ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Pustaka Pelajar, Pustaka Pelajar, 1998, hal 105.

⁴⁰ Gerry van Klinken, *Dari Ngebut Menjadi Mogok*, dalam *Titik Tolak Reformasi : Hari-hari*

berpijak pada politik ekonomi Indonesia sebagai paradigma baru yang harus ditempuh dalam era reformasi meninggalkan politik ekonomi orde baru.

Politik ekonomi yang pertama adalah penghapusan sentralisme dengan melaksanakan desentralisasi pembangunan melalui otonomi daerah secara penuh dan luas; kedua, melepaskan ketergantungan utang luar negeri dalam hal ini Indonesia telah bertekad mengakhiri kerjasama dengan IMF (International Monetary Fund). Pada akhir 2003; dan ketiga, melepaskan ketergantungan pada migas kecuali memproduksinya untuk cadangan nasional. Bagi pemerintah pusat pendapatan negara yang utama adalah dari pajak. Dengan adanya reformasi ekonomi diharapkan Indonesia kembali menemukan format ekonomi yang berpihak kepada rakyat, karena rakyatlah yang paling merasakan penderitaan akibat krisis ekonomi tersebut.

4.4 Reformasi Hukum

Pemerintahan orde baru seringkali menerapkan cara-cara represif dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Banyak contoh yang melibatkan intervensi birokrat dalam setiap kasus, misalnya saja pada kasus 27 Juli 1996, yang sebenarnya masalah intern PDI, atau pada kasus pembunuhan wartawan koran Bernas. Adanya campur tangan aparat pemerintahan dalam kasus-kasus tersebut karena tidak adanya kemandirian dari lembaga peradilan itu sendiri sehingga pada gilirannya lembaga peradilan tersebut

Denagn tiada laginya kemandirian kekuasaan, kehakiman Indonesia, maka para hakim dan kekuasaan kehakiman itu termasuk mahkamah agung, selain dikenal luas oleh masyarakat sebagai mafia peradilan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tidak patut dan merusak citra bangsa, seperti KKN dalam proses membuat putusan-putusannya, juga telah menjadi alat politik kekuasaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan secara totaliter dengan menangkap memenjarakan orang tanpa alasan bertentangan dengan prinsip demokrasi, HAM, dan The rule of law serta prinsip "demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Denagn kata lain kekuasaan peradilan beserta para hakim-hakimnya telah bekerjasama dengan pihakl pemerintah sebagai alat kekuasaan untuk menguasai rakyat.

Berdasarkan pengalaman masa lalu itulah maka pada era reformasi sekarang ini diharapkan kekuasaan peradilan bisa secara arif menata diri dan membebaskan diri dari segaya budaya terhadap kekuasaan lain.

5. Otoriterianisme dan Orde Baru

5.1 Pengertian Otoriterianisme

Istilah otoriterianisme mengacu pada istilah sifat otoriter atau paham untuk mematuhi seseorang atau suatu badan secara mutlak. Otoriterianisme berkembang dari istilah otoritarian yang berarti otoriter atau menganut paham kepatuhan kepada seseorang atau badan, sedang akar kata dari kedua istilah itu (otoriterianisme dan otoritarian) berasal dari kata otoritas (authority) yang dapat diartikan menjadi : (1) wibawa, (2) kekuasaan, (3) kehormatan, (4) pengaruh yang berpengaruh, (5)

wewenang dan, (6) sumber.⁴¹ Lebih jauh otoritas dalam arti wewenang dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang berasal dari penerimaan seseorang yang mau mengakui hak orang lain untuk membuat peraturan-peraturan, mengeluarkan perintah-perintah, dan melaksanakan peraturan atau perintah itu. Otoritas atau wewenang dalam sistem politik dapat dimaknai bahwa "rakyat mau mengikuti peraturan-peraturan, menerima akibat-akibat, dan patuh kepada keputusan para pejabat yang memerintah."⁴²

5.2 Otoriterianisme Orde Baru

Otoriterianisme orde baru dapat diketahui dari model-model yang dipakai untuk menjalankan politik otoriterinya, seperti beberapa pendapat berikut :

Menurut Moctar Mas'ud,⁴³ model otoriterianisme orba adalah model birokratik otoriter korporatis yang mempunyai ciri yaitu :

- (1) Pemerintah dipimpin oleh militer yang bekerjasama dengan teknokrat sipil, (2) pemerintah didukung oleh pemilik modal domestik atau perusahaan besar yang memiliki hubungan khusus dengan negara kapitalisme internasional mendominasi perekonomian Indonesia, (3) pembuatan kebijaksanaan lewat pendekatan teknokrat-birokratik bukan lewat tawar menawar, (4) mobilisasi massa, parpol dan kelompok kepentingan dinonaktifkan, dan penciptaan jaringan

⁴¹ Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1990, hal 46.

organisasi korporatif, (5) tindakan represif bagi oposisi, dan (6) lembaga kepresiden yang kuat dan otonom.

Sedangkan menurut Arief Budiman menamakan otoriterianisme orde baru dengan model negara otoriter birokratik rente,⁴⁴ sebagai pembanding dengan Korea Selatan. Dengan ciri-ciri kaum borjuas tidak terbentuk, adanya imbalan, rente, ongkos sewa dari pengusaha kepada elit penguasa. Dan menjadikan birokrasi sebagai "alat produksi" untuk akumulasi modal lewat sistem rente.

6. Pemilihan Umum

6.1 Pengertian Pemilihan Umum

Secara garis besar pemilu mempunyai pengertian sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat menjalankan roda pemerintahan. Atau dalam pengertian lain yaitu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat dan karenanya itu harus dilaksanakan dalam waktu tertentu. Pemilu hakikatnya merupakan suatu kenyataan yang dilakukan oleh rakyat memilih untuk memilih wakil-wakilnya ataupun pejabat-pejabat untuk dapat duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut DPR.

Pemilu merupakan pranata terpenting tiap-tiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi tiga fungsi pokok demokrasi, yaitu : kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintah secara teratur.

Kedua, rotasi Kekuasaan. Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak ahanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tetutup sama sekali, biasanya, partai politik yang menang dalam pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan pada pemilihan berikutnya. Dalam negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotsasi kekuasaan biasanya rendah pula. Bahkan peluang untuk itu sangat terbatas walaupun ada, hal itu hanya kan dilakukan dalam lingkungan yang terbatb dikalangan elit politik saja.

Ketiga, Rekrutmen yang terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam lmelakukan kompetisi untukmengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oieh beberapa gelintir orang saja.

Keempat, Pemilihan Umum. Dalam suatu negara demokratis, pemilu dilakukansecara teratur, setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, serta bebas menggunakan hak nya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk

rasa takut atau paksaan, dari orang lain. Pemilih juga bebas untuk melakukan segala aktifitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.

Kelima, Hak-hak dasar. Dalam sebuah negara demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (freedom of expresion), hak untuk berkumpul, hak untuk menikmati Pers yang bebas.

Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat sekitarnya Dengan kata lain dia punya hak untuk menentukan agenda apa yang diperlukan hak untuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan memasuki berbagai organisasi politik dan non politik. Tanpa dihalang-halangi oleh siapapun dan institusi manapun. Kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang dmokratis mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu sepanjang tidak mengandung elemen menghina, menghasut, ataupun mengadu domaba sesama warga masyarakat.

C. Definisi Konsepsional

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, suatu konsep

a. **Perilaku Politik Muhammadiyah**

Adalah perbuatan, perlakuan, atau tindakan dan juga aksi yang dijalankan oleh (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah dalam mengalokasikan sejumlah nilai yang bersifat mengikat bagi individu, kelompok atau masyarakat atau dalam ikut mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik sebagai respon terhadap politik . Dalam hal ini, tindakan atau kegiatan Muhammadiyah baik sebagai lembaga atau dilakukan oleh para aktor, terutama elit pimpinannya (PP Muhammadiyah).

b. **Reformasi**

Adalah usaha untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dalam bidang sosial, politik , agama, dan lain sebagainya di suatu masyarakat atau negara.

C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini perilaku politik Muhammadiyah de era reformasi sejak runtuhnya otoriterianisme orde baru sampai pemilu 2004 akan dideskripsikan kedalam beberapa indikator agar lebih terarah, yaitu :

1. Masa kepemimpinan Prof. DR. BJ Habibie sebagai Presiden RI ke-3
 - a. Sikap Muhammadiyah Terhadap Kepemimpinan Prof. DR. Ing Habibie sebagai Presiden RI Ke-3
 - b. Keinginan warga Muhammadiyah untuk mempunyai wadah politik
 - c. Mendukung proses demokratisasi dan suksesi kepemimpinan nasional lewat pemilu 1999
2. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI Ke- 4

- b. Keterlibatan Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam Kabinet Pelangi dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid
 - c. Kontribusi Muhammadiyah Dalam Menjaga Persatuan Bangsa Pasca Kejatuhan Pemerintahan Abdurrahman Wahid
3. Masa kepemimpinan Megawati Sukarno Putri sampai pemilu 2004
- a. Sikap Muhammadiyah terhadap naiknya Megawati Sukarno Putri sebagai presiden RI Ke-5.
 - b. Pernyataan-pernyataan elit Muhammadiyah dalam pemilu DPD
 - c. Mendukung kader terbaik Muhammadiyah untuk maju menjadi calon Presiden dalam Pemilu 2004

D. Unit Analisis

Untuk mempermudah dalam penelitian selanjutnya dan untuk membatasi agar tidak keluar dari fokus penelitian, maka unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan daripada penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁵

2. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, dimana data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penyusun lakukan.

3. Teknik Pengumpul Data

Dalam suatu penelitian ilmu sosial, masalah pengumpulan data kadang bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu seseorang peneliti sebelum terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian terlebih dahulu harus dapat menentukan teknik-teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian nantinya. Sesuai dengan metode penelitian yang telah penyusun tentukan diatas. Maka untuk memperoleh data-data tersebut penyusun menggunakan teknik atau cara pengumpulan data yaitu :

a. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi telah di digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramal. Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data dari surat-surat, arsip, dan catatan-cataatan, buku dan dokumen-dokumen.

b. Teknik Wawancara

Menurut Lexi Moeloeng wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu : pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban pertanyaan.⁴⁶ Sedangkan menurut Husain Purnomo, wawancara secara sederhana diartikan sebagai tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁴⁷

Adapun yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah mereka yang berhubungan dengan organisasi Muhammadiyah yaitu pengurus PP Muhammadiyah.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan teknik atau kualitatif adalah “ data yang dikumpulkan berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit serta data yang diperoleh dalam penelitian itu tidak dianalisis dengan menggunakan angka-angka melainkan dengan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian

⁴⁶ Lexi Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, 2001, hal 112.

Sedangkan definisi data kualitatif menurut Lincoln Arsyad adalah analisa data tanpa berdasar angka-angka perhitungan tetapi berdasarkan atas pandangan, pendapat, dan pemikiran menganalisa data.⁴⁸

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada di dalamnya yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka dasar teori, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PERILAKU POLITIK MUHAMMADIYAH :

DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

1. Perbandingan Strategi Perjuangan Umat Islam Kultural dan Struktural

1.1 Strategi Perjuangan Umat Islam Kultural

1.2 Strategi Perjuangan Umat Islam Struktural

2. Orientasi Religius- Kultural (1912-1937)

Pada bagian ini Muhammadiyah masih seperti apa adanya sejak organisasi ini berdiri atau sejak kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan, dimana orientasi Muhammadiyah masih sederhana yang lebih mementingkan tujuan utama gerakan inidirikan yaitu hanya bergerak dalam bidang sosial keagamaan.

3. Orientasi Politis/Struktural (1937-1971)

Dalam bagian ini akan diterangkan secara panjang lebar tentang kondisi Muhammadiyah , sejak dikalahkannya Kolonial Belanda oleh penudukan Jepang samapai kekuasaan Rezim Orde lama tumbang dan lahirnya rezim Orde Baru.

4. Orientasi Sosial-Kultural (1971-1995)

Pada bagian ini akan dibahas tentang perubahan azas Muhammadiyah menjadi Pancasila dan dalam hubungan vis anggaran vis dengan pemerintah orde baru yang cenderung “anti Islam”. Dan adanya gerakan kristenisasi dalam segala bidang serta hegemoni negara terhadap semua organisasi dengan Pancasila sebagai azas tunggal.

5. Orientasi Politis- Kultural (1995-1998)

Pada bagian ini akan diuraikan secara panjang lebar gerakan politik Muhammadiyah pada masa Amien Rais yang ditandai dengan adanya gerakan high politic dan tauhid sosial dan gaya politik dan kepemimpinan yang berbeda dari akomodatif-kooperatis menuju akomodatif kritis dari seorang kiai ke prof.

BAB III ; PERILAKU POLITIK MUHAMMADIYAH DI ERA REFORMASI

- 1. Muhammadiyah dan Suksesi Kepemimpinan Nasional**
- 2. Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Pemerintah**

Denagn lengsernya Presiden Soeharto dari panggunga politik nasinal maka berakhirilah sudah rezim orde baru dan diganti oleh masa trasisi menuju demokrasi dibawah Habiie, pada saat ini keterlibatan Muhammadiyah yang signifikan dalam mengantar reformasi, bahkan ketua umumnya menjadi lokomotif reformasi, dalam bagian ini akan diuraikan lebih lanjut tentang kontribusi Muhammadiyah terhadap perjalanan awal reformasi.

2.2 Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Pada fase ini terjadi benturan yang keras antara pendukung dan anti Abdurrahman Wahid, akibatnya menyeret Muhammadiyah dlama politik praktis, hal ini karena aset-aset Muhammadiyah yang dirusak pendukung Abdurrahman Wahid, untuk pembahasanya dapat ditemukan dalam bagian ini.

2.3 Masa Pemerintahan Megawati Sukarno Putri (2001-2004)

Di era kepemimpinan Megawati ini kondisi bangsa semakin jauh dari reformasi yang ditandai dengan semakin trasparansinya KKN dan gejala bangkitnya kekuatan status quo, hal in ditandai dengan adanya kebangkitan kekuatan orde baru: dalam berbagai bentuk gerakan.

3. Perilaku politik Muhammadiyah Menjelang Pemilu

1. Kriteria Pemimpin Nasional Menurut Muhammadiyah

2. Hubungan Muhammadiyah dengan PAN

3. Antara Muhammadiyah , Amien Rais dan Pemilihan Presiden
Langsung.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan ditutup dengan memberikan kesimpulan dari penjelasan bab-bab sebelumnya yang disertai dengan rekomendasi yang mendukung